



# Implementasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/impementasi/index>

Volume 2 (2) 2021, 89-93

## Transformasi besarnya ptkp analitis perhitungan pph pasal 21

Dicky Sulaeman<sup>1</sup>, Dwiki Ramadhan<sup>1</sup>, Aprinia Handayani, S.Si., M.Kom<sup>1</sup>,  
E-mail : 164.ds92@gmail.com, ramadhandwiki35@gmail.com, dosen02719@unpam.ac.id

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

Article history: Received on 28 Oktober 2021, Revised on 27 November 2021 , Published on 12 Desember 2021

### ABSTRACT

Tax is a very large state income and affects the state, tax levies are coercive based on the law with the aim of public welfare. For example, the streets we use are the result of a tax or education that is enjoyed for free is also the result of a tax and much more. The Community Service activity carried out by the Pamulang University student team in collaboration with SMK Bumi Sejahtera aims to provide an explanation of how to calculate and what components are in Article 21 PPh. The results of this activity show that many people do not understand how to calculate, report and pay a tax to the state. As students, we have a duty to provide a knowledge that we are currently studying to be practiced in the surrounding environment and can be useful for the community.

**Keywords:** Taxes, Calculating, Reporting, Paying, PPh article 21

### ABSTRAK

Pajak merupakan sebuah pendapatan negara yang sangat besar dan berpengaruh terhadap negara, pungutan pajak bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Contohnya jalanan yang kita pakai merupakan hasil dari sebuah pajak atau pendidikan yang dinikmati secara gratis pun merupakan hasil dari sebuah pajak dan masih banyak lagi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh tim mahasiswa Universitas Pamulang bekerja sama dengan SMK Bumi Sejahtera bertujuan untuk memberikan penjelasan bagaimana cara menghitung dan komponen apa saja yang ada di dalam PPh pasal 21. Hasil dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum mengerti akan caranya menghitung, melapor dan membayar sebuah pajak kepada negara. Sebagai mahasiswa kami memiliki sebuah tugas untuk memberikan sebuah ilmu yang sedang kami pelajari saat ini untuk dipraktikkan dilingkungan sekitar dan bisa berguna bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pajak, Menghitung, Melapor, Membayar, PPh pasal 21

## **Pendahuluan**

Pajak adalah iuran yang bersifat memaksa dan digunakan negara untuk kesejahteraan rakyat dalam membangun negara. Sumber pemasukan kas terbesar di Indonesia hingga sekarang berasal dari pajak. Menurut Syarifudin, A. (2021) sumber jurnal UNTIDAR : kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar 73,57 persen atau setara Rp.614,4 triliun dan 26,31% Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.219,7 triliun PPh Pasal 21 adalah pajak yang didasarkan pada setidaknya satu orang dan terdiri dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan berdasarkan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan oleh pajak subjek dalam negeri. Pajak penghasilan dipungut berdasarkan PPh Pasal 21 dengan pemotongan pajak penghasilan melalui pengurangan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21. Oleh karena itu, sebagai pihak yang menerima kredit pajak penghasilan pasal 21, pihak yang menerima penghasilan berdasarkan pajak penghasilan pasal 21 berhak mengajukan penghasilan pasal 21. Pernyataan pajak dari PPh pasal 21 untuk menerima pemotongan pajak. Sebelum pemotongan pajak penghasilan pasal 21, wajib pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan untuk pemotongan pajak pasal 21 ke Kantor Layanan Keuangan. Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dapat diverifikasi pada Surat Tanda Terdaftar (SKT) yang diterima dari Badan Jasa Keuangan pada saat pendaftaran NPWP. Bagian pasal 21 kredit pemotongan pajak mengharuskan anda untuk mengajukan bagian 21 PPh dengan Bank Persepsi atau Kantor Pos dan melaporkan Bagian pasal 21 Kredit Pajak Penghasilan anda ke Departemen Layanan Keuangan bersama dengan pernyataan Peraturan Pajak Penghasilan Bagian pasal 21. Jika anda menyatakan barang-barang yang memenuhi syarat untuk pengurangan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 dalam pengembalian pajak penghasilan reguler berdasarkan Pasal 21 selama satu tahun, pengembalian pajak penghasilan terlampir harus mencakup biaya-biaya yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 21. Harus dengan biaya yang sama.

## **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan seluruh catatan transaksi perusahaan yang didokumentasikan menjadi sebuah laporan (Budi 2016). pengembalian pajak penghasilan. Subjek pajak memiliki persamaan dan perbedaan sebagai bagian dari sistem keuangan dan skema untuk perhitungan pajaknya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, Withholding Assessment System. Sistem pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan keringanan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final dan tarif flat. Jadi maksudnya Wajib pajak (WP) tidak melakukan laporan keuangan, tetapi menggunakan katatinisasi bruto (omzet). Biaya pembayaran didasarkan pada tarif omzet 0,5 persen dan bersifat final, sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan dengan kredit pajak selama periode berikutnya. Dengan demikian, PPh final tidak termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti rasio bias terhadap bias pada Wajib Pajak (WP) Badan maupun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada WPOP.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan penghasilan bruto yang diberikan pada orang pribadi wajib pajak dalam negeri sebelum perhitungan PPh terhutang yang tidak bersifat final. Diatur dalam undang-undang dan peraturan kementerian keuangan besaran PTKP. Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan wajib pajak berdasarkan untuk menghitung penghasilan pajak. Oleh karena itu pembukaan / pencatatan sangat penting didalam perpajakan bersifat sangat kursial, karena apa yang dibukukan dan dicatat akan

menjadi dasar bagi setiap wajib pajak (WP) untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang dan akan membuat wajib pajak lebih mudah. Dan mengapa pemahaman mengenai akuntansi perpajakan sangat penting karena untuk menghitung pajak yang akurat. Selain kesadaran pribadi, belajar pajak memberikan manfaat kepada kita mulai dari pajak fungsi pajak, sanksi pajak bagi pelanggar dan semua yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan.

Dalam 10 tahun sebelum PPh final, dari tahun 2011 hingga 2020, masyarakat mengikuti 3 perubahan PTKP, yang terakhir adalah pada tahun 2012.2015, dan 2016. Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong terciptanya efek multi dibidang perpajakan. Perubahan PTKP dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kedua pencapaian tersebut.

### **Metode Pengabdian**

Kegiatan PKM yang dilakukan oleh tim mahasiswa universitas pamulang pada SMK Bumi Sejahtera menggunakan metode awal memaparkan materi dengan menjelaskan secara teoritis mengenai teori yang berkaitan dengan penerapan PPh pasal 21 kaitannya dengan penyajian laporan Wajib Pajak yang sesuai. Setelah itu kami menjelaskan bagaimana cara menghitung dan komponen apa saja yang ada didalam PPh pasal 21. Setelah siswa mengetahui cara menghitung dan komponen apa saja yang ada didalam PPh pasal 21, maka tim PKM memberikan contoh soal sebagai pelatihan siswa untuk menghitung dan mengetahui berapa PPh pasal 21 yang terhutang selama setahun.

Pelatihan tersebut diberikan kepada seluruh siswa yang hadir dalam PKM sehingga kedepannya siswa yang berniat untuk bekerja bisa menghitung PPh pasal 21 yang terhutang selama setahun, kami selaku tim PKM pun mengarahkan siswa yang masih belum mengerti dan salah dalam menghitung PPh pasal 21.

### **Hasil dan Pembahasan**

Adapun hasil yang didapat dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Siswa dapat memahami perubahan besar PTKP pada perhitungan PPh pasal 21.
2. Siswa dapat menyusun laporan Wajib Pajak sesuai dengan perhitungan PPh pasal 21.
3. Siswa menyajikan laporan keuangan sesuai dengan pph pasal 21 mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba terutama kaitannya.

Menurut Fitriya menjelaskan sumber Klikpajak :

PTKP merupakan upaya kedua dari Wajib Pajak yang diturunkan dari PPh Pasal 21. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, PTKP adalah jumlah Wajib Pajak (WP) Pribadi tertinggi yang ditetapkan oleh PPh Pasal 21. Proses PPh 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), akan berfungsi sebagai pengurang netto Wajib Pajak.

Berdasarkan Peraturan MenKeu (PMK) RI Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, nilai PTKP untuk WP Orang Pribadi yang berstatus belum kawin atau tidak ada tanggungan adalah sebesar Rp54.000.000 per tahun atau Rp4.500.000 per bulan. Jika wajib pajak menerima pembayaran lebih dari Rp4.500.000 per bulan, ia harus membayar PPh 21. karena penghasilan tahunannya diatas PTKP. Wajib Pajak bertanggung jawab atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tetapi Wajib Pajak juga bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Kewajiban ini dipicu saat Wajib Pajak menerima Status Tidak Sah/Non-Efektif (NE) DJP.

Sebagai contoh, PTKP yang diterapkan dalam hal ini sesuai dengan Peraturan MenKeu Nomor 101/PMK.010/2016. Selain itu, berikut ini berlaku untuk tarif PTKP saat ini:

1. PTKP saat ini bagi WP yang belum kawin dan tidak ada tanggungan adalah Rp54.000.000,00;
2. PTKP bagi WP yang sudah kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00;

3. Tambahan PTKP saat ini untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami dan melapor pajaknya digabung adalah Rp54.000.000,00;
4. Tambahan PTKP saat ini untuk yang ada tanggungan, sebesar Rp4.500.000,00 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada di garis keturunan lurus dan anak angkat.  
Jumlah tanggungan maksimal tiga orang per WP

### **Kesimpulan dan Saran**

Kegiatan yang dilakukan tim mahasiswa pengabdian kepada masyarakat Universitas Pamulang untuk memberikan gambaran betapa pentingnya laporan wajib pajak terhadap PPh pasal 21. untuk menghitung besarnya pajak bagi badan/orang pribadi. Hal ini dikarenakan laporan wajib pajak memberikan dampak terhadap pengambilan keputusan bagi Masyarakat Sejahtera dalam membuat kebijakan strategis. Dengan pembuatan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar yang berlaku, membuat kualitas laporan keuangan menjadi baik. Penerapan PPh 21 mengenai besarnya perubahan PTKP pada perhitungan PPh pasal 21. Berdasarkan kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan cara yang efektif disertai dengan bukti atau contoh dari laporan keuangan PPh 21 untuk memudahkan para user dalam menyusun laporan keuangan. Dan masyarakat tidak perlu khawatir sekarang pembayaran pajak sudah bisa online dan tidak perlu ke kantor pelayanan pajak serta mudah digunakan dalam urusan laporan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi, S. ANALISIS PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PERSEDIAAN, PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP TINGKAT LABA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Terhadap Perusahaan Otomotif pada Malaysia Exchange Stock Tahun 2011-2016).
- Fitriya. PTKP Terbaru: Istilah Status PTKP PPh 21 dan Tarif PTKP. Klikpajak. Published April 12, 2021. Accessed October 1, 2022. <https://klikpajak.id/blog/pengertian-ptkp/>
- Syarifudin, A. (2021). Analisis Dampak Perubahan PTKP dalam Perhitungan Pph 21 . Universitas *Putra Bangsa*, 17.
- <https://www.pajakku.com/read/5d4920666fd6cc1a05c6cf4a/Tarif-PTKP-Beserta-Cara-Menghitung-Penghasilan-Tidak-Kena-Pajak>
- <https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-21-apa-itu-and-cara-menghitungnya>
- <https://konsultanku.co.id/blog/pengertian-penghasilan-kena-pajak-pkp-dan-penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp#:~:text=Penghasilan%20kena%20pajak%20%28pkp%29%20adalah%20penghasilan%20yang%20dijadikan,dikurang%20dengan%20upah%20untuk%20mengumpulkan%20dan%20menjaga%20penghasilan.>